

**Breakfast Meeting MADANI**  
**“Peluang dan Tantangan**  
**RAN Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan**  
**dalam Perbaikan Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia”**  
Selasa, 18 Februari 2020

Narasumber:

1. **Dr. Siswo Pramono, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri**
2. **Muhammad Saifulloh, sisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**
3. **Ismu Zulfikar, Kompartemen Sertifikasi ISPO Bidang Implementasi ISPO, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia.**
4. **M. Teguh Surya, Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan**

Hasil penyampaian:

**Muhammad Saifulloh, Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**

Terkait perkembangan RAN KSB, saat ini sedang berproses dalam draft SK tim nasional. Tim Nasional berisi para menteri. Presiden memberikan hak veto ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, namun dengan tetap berkoordinasi dengan kementerian lain yang bersangkutan.

Dalam penyusunan RAN KSB, kementerian dan lembaga selalu dilibatkan. Kemenko Perekonomian juga mengkoordinasikan proses data tutupan lahan sawit yang melibatkan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, BPN, KLHK, GAPKI, BIG dan KEHATI. Kebijakan palm oil juga telah melibatkan privat sektor dan NGO.

Inpres RAN GRK ini sebagai optimasi dari tupoksi yang sudah ada di Kementerian/Lembaga. Isi dari Inpres ini bukan sesuatu yang baru, namun yang telah berjalan di masing-masing Kementerian/Lembaga. Jikalau ada sesuatu yang baru, itu adalah upaya untuk mengoptimasi dari yang tersendat di Kementerian/Lembaga tersebut.

Saat ini moratorium sawit telah berjalan. Reforma agraria juga telah berjalan, dan ini bisa diklaim sebagai output progressnya RAN KSB. Dan ini telah dikoordinasikan dengan KLHK dan ATR/BPN. Begitu juga dengan Kebijakan Satu Peta yang telah ada tutupan sawit 16,3 juta ha. Wali datanya ada di Kementerian Pertanian.

Terkait dengan sawit, pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan stakeholder di daerah. Namun koordinasi harus terus ditingkatkan.

### **Dr. Siswo Pramono, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri**

Saat ini yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri adalah melakukan diplomasi. Tugas utamanya adalah membantu tata kelola dengan menggandeng pihak-pihak luar untuk turut membantu, dengan pendekatan kerjasama.

Hal lain yang telah dilakukan adalah membuat program Course of Oil Palm dengan sasaran anak muda untuk mengenal sawit, seperti mengajak mereka tinggal dekat para petani sawit. Dari sini juga sudah banyak artikel yang diterbitkan di berbagai jurnal.

Program lain adalah sawit dengan sistem tumpang sari, seperti tumpangsari tanaman sawit dengan cabai, durian atau juga jengkol. Pohon sisipan ini harus sesuai dengan demand lokal. Harapannya ini mampu membantu ekonomi petani lokal ketika harga CPO turun.

Kegiatan lain adalah melakukan kerjasama dengan salah satu Lembaga dari Amerika untuk program sawit di Kabupaten Musi Banyuasin.

### **Desriko, LTKL**

Salah satu kabupaten lestari yang didampingi LTKL adalah Kabupaten Musi Banyuasin. LTKL sedang mendorong sawit dan karet menjadi komoditas unggulan. Di Musi Banyuasin saat ini dilakukan pendekatan integrasi melalui implementasi RAN KSB dengan mendorong private sector dan smallholder. Upaya yang dilakukan LTKL antara lain bagaimana agar peraturan di nasional bisa terintegrasi di tingkat daerah. Dan informasi terkait RAN KSB dapat sampai dengan jelas ke tingkat bupati.

Di Sintang, sebelum keluar RAN KSB, Kabupaten Sintang sudah mengeluarkan Rencan Aksi Daerah. Di Kabupaten lain juga sudah membuat buku panduan tentang implementasi RAN KSB.

### **Ismu Zulfikar, Kompartemen Sertifikasi ISPO Bidang Implementasi ISPO, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia.**

GAPKI menyambut baik RAN KSB ini karena GAPKI adalah salah satu pelaku pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Dalam proses penyusunan RAN KSB juga dilibatkan dalam masukan penyusunan RAN KSB.

GAPKI akan memastikan seluruh anggota untuk dapat memahami isi dari RAN KSB. Sebenarnya yang harus dipastikan itu adalah kordinasi dan sinergi antar Lembaga pemerintah.

ISPO adalah platform tata kelola pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Di dalam ISPO itu telah diatur bagaimana tata kelola sawit yang baik itu sendiri. GAPKI mendorong semua anggota GAPKI untuk sertifikasi ISPO. Sebanyak 405 sertifikas atau 65% total ISPO nasional yang mendapatkannya adalah GAPKI. 273 Perusahaan telah dilatih untuk menerapkan ISPO. GAPKI menginisiasi sendiri dorongan kepada anggotanya terkait dengan ISPO, padahal seharusnya ini adalah tugas dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

### **M. Teguh Surya, Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan**

Dalam lima tahu ke depan, sawit mendapatkan momentum yang besar dalam pemerintahan Joko Widodo. Di sisi lain ada juga persoalan serius dalam industri sawit. Diantaranya sawit ilegal, merambah kawasan hutan, dan yang lain. Kelompok-kelompok bisnis yang melakukan upaya perbaikan harus tetap didorong untuk lebih baik dalam mencapai komitmen pemerintah. Bagi industri sawit yang belum patuh, jangan sampai mencederai komitmen yang telah dibangun. Sehingga pemerintah harus mengambil tindakan bijak untuk menertibkannya.

Terkait dengan RAN KSB, Madani memberikan apresiasi. Dari 16 penerima instruksi dari Kementerian dan Lembaga, banyak yang positif. Namun jangka waktu yang diatur hanya satu periode pemerintahan. Harusnya ini bisa mengatur dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, RAN KSB belum menyorot upaya peningkatan akuntabilitas untuk mencegah korupsi. Merujuk pada laporan KPK tahun 2016 tentang pengelolaan komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan, dijelaskan bahwa ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, proses akuntabilitas sistem pengendalian dalam perijinan. Kedua, efektifitas pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit. Tiga, tidak optimalnya pengurangan pajak sektor kelapa sawit. Tiga poin penting yang direkomendasikan KPK ini belum diakomodasi di dalam RAN KSB.

### **Irfan Bakhtiar, Program Director, Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia (SPOS-Indonesia)**

Sawit di kawasan hutan tahun 2019 hasil perhitungan KEHATI luasnya 3,4 juta ha. Yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah jalan keluar penyelesaian tersebut.

Sawit rakyat di kawasan hutan jalan keluarnya seharusnya PPTKH. Namun dalam Perpres 88 dan Permenko 3 dinyatakan bahwa sawit tidak masuk dalam skenario PPTKH.

Saat ini sawit rakyat ada 43 persen. Data KEHATI menunjukkan bahwa sawit swadaya ada 2 juta ha. Pekerjaan rumahnya adalah mendata ini.

Dengan luas perkebunan sawit rakyat ini maka estimasi yang dibutuhkan untuk melakukan pemetaan sawit rakyat sebesar Rp 2 triliun.

### **Surambo, Deputy director sawit Watch**

Perlu dipikirkan juga kepastian hak.

Belum ada kesatuan data. Data Kementan menyebutkan sebesar 16,3 juta ha, sementara Presiden pernah menyebut sebesar 14,8 juta ha.

Terkait moratorium sawit, tim kerja belum memberikan hasil yang signifikan untuk mendata sawit di kawasan hutan. Selama 1,5 tahun belum menghasilkan data dasar.

### **Abimanyu Sasongko Aji, Kemitraan**

Permasalahan sawit ini telah berlangsung lama, bahkan lebih dari 10 tahun dan isu yang berkembang masih itu-itu saja, tidak berubah dan tidak mengalami kemajuan untuk menyelesaikan permasalahan sawit. Tata kelola masih menjadi isu utama. Integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas menjadi tolak ukur dari buruknya pengelolaan itu. Transparansi data sawit masih terbilang buruk sampai dengan sejauh ini. Kalau ingin memperbaiki maka tolak ukur tersebut harus diutamakan.

### **Sri Palupi, Ecosob Right**

Sejauh ini belum ada perencanaan akan sampai kapan kita bersawit, sejauh mana akan ekspansi dan sampai kapan. Padahal ancamannya tidak hanya masalah lingkungan, tetapi juga soal pangan, karena ekspansi sawit menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Dan masyarakat seperti berada dalam ketidakpastian. Perlu keputusan tepat dalam memperbaiki tata kelola dan strategi ke depan.

oooOOOooo

Kontak media:

Luluk Uliyah, Senior Media Communication Officer, Yayasan Madani Berkelanjutan, HP. 0815 1986 8887